



# Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn dalam Tinjauan Pengelolaan Sampah di Kelurahan Kebon Jayanti

Aghisna Derajat Akbar\*, Prayoga Bestari, Asep Mahpudz

Universitas Pendidikan Indonesia

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 09 Tahun 2018 mengenai pengelolaan sampah di wilayah Kelurahan Kebon Jayanti, dengan mengacu pada model implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn. Pendekatan penelitian yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif. Informasi diperoleh melalui wawancara mendalam dengan perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup, aparat kelurahan, ketua RW, serta warga dari RW 05, RW 07, dan RW 10. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah kendala dalam enam variabel utama, antara lain ketidakjelasan arah kebijakan dan targetnya, keterbatasan dalam hal sumber daya manusia maupun anggaran, kesenjangan dalam kapasitas pelaksana, kurangnya komunikasi antar pemangku kepentingan, disposisi pelaksana yang tidak seragam, serta pengaruh kondisi sosial ekonomi warga. RW 07 menjadi contoh praktik implementasi yang relatif berhasil karena adanya dukungan kelembagaan, program yang berjalan konsisten, serta keterlibatan aktif dari masyarakat. Hasil ini menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan kebijakan dipengaruhi oleh kejelasan tujuan, kesiapan para pelaksana, dan kecukupan sumber daya. Untuk itu, perlu dilakukan penguatan koordinasi lintas aktor, peningkatan kapasitas pelaksana, serta pembentukan kolaborasi yang berkelanjutan antara pemerintah dan warga guna mewujudkan pengelolaan sampah yang efektif di tingkat lokal.

**Kata Kunci:** Implementasi Kebijakan, Perda No.09 Tahun 2018, Van Meter, Van Horn

DOI:

<https://doi.org/10.53697/iso.v5i2.2808>

\*Correspondence: Aghisna Derajat Akbar

Email: [derajataaghisna@upi.edu](mailto:derajataaghisna@upi.edu)

Received: 22-10-2025

Accepted: 22-11-2025

Published: 22-12-2025



**Copyright:** © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstract:** This study aims to evaluate the implementation of Bandung City Regional Regulation No. 09 of 2018 concerning waste management in Kebon Jayanti Subdistrict, using the policy implementation model proposed by Van Meter and Van Horn. The research employs a descriptive qualitative approach. Data were collected through in-depth interviews with representatives from the Environmental Agency, subdistrict officials, neighborhood heads (RW), and residents from RW 05, RW 07, and RW 10. The findings reveal several challenges across six key variables, including unclear policy direction and targets, limited human and financial resources, uneven capacities among implementers, weak inter-actor communication, inconsistent implementers' disposition, and the influence of residents' socioeconomic conditions. RW 07 serves as a relatively successful case due to strong institutional support, consistent program execution, and active community participation. The results indicate that the success of policy implementation is strongly influenced by the clarity of objectives, the readiness of implementers, and the adequacy of available resources. Therefore, it is necessary to strengthen inter-actor coordination, enhance implementers' capacity, and foster sustainable collaboration between the government and the community to achieve effective local waste management.

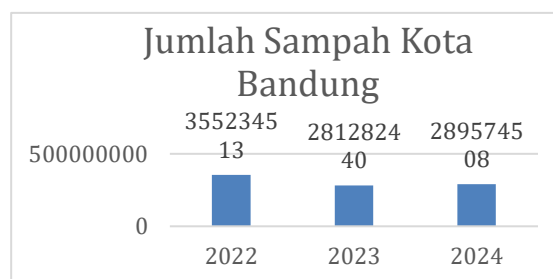
**Keywords:** Policy Implementation, Regional Regulation No. 09 of 2018, Van Meter and Van Horn

## Pendahuluan

Permasalahan pengelolaan sampah rumah tangga di wilayah perkotaan merupakan tantangan global yang semakin kompleks, seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, aktivitas ekonomi, dan pola konsumsi masyarakat (Lasaiba, 2024). Tidak hanya berdampak pada kebersihan dan estetika kota, masalah ini juga berkaitan langsung dengan aspek kesehatan publik serta keberlanjutan lingkungan hidup (Kahfi, 2017). Kondisi ini menuntut pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk merumuskan kebijakan yang komprehensif dan terstruktur dalam menangani persoalan sampah secara efektif.

Dalam konteks global dan nasional, studi menunjukkan bahwa peningkatan volume sampah memicu tekanan lingkungan serius serta risiko emisi gas rumah kaca, terutama dari sampah organik (UNEP, 2024). Selain itu, riset terbaru di Indonesia menemukan bahwa pendekatan berbasis masyarakat seperti 'waste bank' dan 'waste sadaqah' mampu meningkatkan keterlibatan komunitas serta mengurangi sampah rumah tangga melalui model circular economy yang produktif (Yamtana, Duha, Riduan, Sabir, & Aprianto, 2023). Keberhasilan ini menegaskan bahwa kebijakan pengelolaan sampah akan lebih efektif jika dirancang dengan partisipasi aktif warga dan institusi lokal (Irfana, Harjono, & Diana, 2023).

Kota Bandung sebagai salah satu kota besar di Indonesia menghadapi tekanan yang sama. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Puspita (2023), Dengan jumlah penduduk yang terus bertambah mencapai 2.469.589 jiwa pada tahun 2023 volume sampah pun meningkat, disertai dengan jenis dan karakteristik yang semakin beragam akibat perubahan gaya hidup dan konsumsi masyarakat. Data dari Dinas Lingkungan Hidup menunjukkan bahwa timbulan sampah harian di Kota Bandung mencapai 1.594 ton, dan terus mengalami peningkatan sejak tahun 2020 hingga 2024 (Puspita, 2023). Bahkan menurut Opendata Bandung (2024), total produksi sampah pada tahun 2024 mencapai 289.574.508 kilogram, menjadikan Bandung sebagai penyumbang sampah terbesar ketiga di Jawa Barat.



Gambar 1. Jumlah Sampah Kota Bandung

Berbagai kendala juga ditemukan dalam infrastruktur pengelolaan sampah, seperti kelebihan kapasitas di 30 TPS (Tempat Penampungan Sementara), keterbatasan alat berat di TPA Sarimukti, serta minimnya lahan yang tersedia untuk menampung volume sampah yang ada (Muthi Janatun, Rosiana & Darmawan, 2023). Di sisi lain, masih banyak masyarakat yang memandang sampah sebagai objek yang tidak lagi mempunyai nilai dan fungsi untuk seseorang sehingga dilakukan pembuangan (Mariane *et al.*, 2025). Hal

ini berdampak pada meningkatnya sampah yang dibuang sembarangan dan menurunkan kualitas lingkungan hidup.

Untuk menjawab persoalan tersebut, Pemerintah Kota Bandung mengesahkan Peraturan Daerah No. 09 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah. Peraturan ini dirancang untuk menciptakan sistem pengelolaan yang terpadu dan berkelanjutan, yang mencakup pengurangan, pemilahan, pengangkutan, hingga pemrosesan akhir. Namun demikian, menurut Indartik, Suryandari, Djaenudin, dan Pribadi, (2018) keberhasilan implementasi peraturan ini sangat bergantung pada efektivitas pelaksana kebijakan di tingkat lokal serta kemampuan menyinergikan berbagai komponen pelaksanaan.

Kelurahan Kebon Jayanti menjadi salah satu wilayah yang cukup strategis dalam konteks ini, karena letaknya yang dekat dengan pusat aktivitas masyarakat seperti pasar dan stasiun. Kawasan padat penduduk ini menghasilkan volume sampah yang signifikan setiap harinya. Berdasarkan hasil penelitian oleh Mulya (2024) rutinitas warga dalam membuang sampah sebanyak dua hingga tiga kali per minggu namun frekuensi ini belum sepenuhnya ideal, mengingat masih terjadi penumpukan dan pencampuran jenis sampah akibat sistem pengangkutan yang belum terintegrasi.

Melihat kompleksitas permasalahan dan kebijakan yang berlaku, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Perda Kota Bandung No. 09 Tahun 2018 di Kelurahan Kebon Jayanti menggunakan pendekatan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Teori ini menekankan enam variabel penting dalam implementasi kebijakan, yakni: standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik pelaksana, komunikasi antar organisasi, disposisi pelaksana, serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Dengan kerangka ini, diharapkan dapat diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilan maupun kendala dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di tingkat kelurahan secara objektif dan menyeluruh.

## Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena sosial yang berkaitan dengan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kelurahan Kebon Jayanti. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam makna, karakteristik, serta konteks sosial dari pelaksanaan kebijakan publik (Firmansyah, Masrun, & Yudha S., 2021). Sejalan dengan itu, Fadilla dan Wulandari (2023) menegaskan bahwa data dalam penelitian kualitatif bersifat non-numerik dan bergantung pada kemampuan peneliti dalam menginterpretasikan informasi yang dikumpulkan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah di tingkat kelurahan, serta menganalisis faktor-faktor penghambat dan pelaksanaannya. Model implementasi kebijakan yang digunakan merujuk pada teori Van Meter dan Van Horn, yang mencakup enam variabel utama: sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antarorganisasi, disposisi pelaksana, serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan informan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung, pihak Kelurahan Kebon Jayanti, serta warga setempat. Observasi dilakukan dengan mengikuti kegiatan lapangan terkait pengelolaan sampah, sementara dokumentasi meliputi telaah terhadap Perda No. 9 Tahun 2018, program pelaksana seperti GELISAH, serta dokumen APBD dan laporan kelembagaan.

Analisis dilakukan secara tematik berdasarkan enam variabel dari model Van Meter dan Van Horn. Pertama, pada aspek sasaran kebijakan, peneliti menelaah tujuan Perda dan program teknisnya. Kedua, pada sumber daya, ditelusuri aspek tenaga kerja, fasilitas, dan anggaran. Ketiga, karakteristik organisasi pelaksana dianalisis dari struktur, kewenangan, dan efektivitas koordinasi antarinstansi. Keempat, komunikasi antarorganisasi dikaji melalui jalur informasi resmi dan informal yang digunakan antar pelaksana. Kelima, disposisi pelaksana dievaluasi berdasarkan sikap dan pemahaman aparat terhadap kebijakan. Keenam, lingkungan sosial, ekonomi, dan politik dipertimbangkan untuk melihat dinamika masyarakat, peran sektor informal, serta sikap pemangku kepentingan lokal.

Lokasi penelitian difokuskan di Kelurahan Kebon Jayanti, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung. Pemilihan lokasi didasarkan pada permasalahan aktual seperti keterbatasan sarana persampahan dan tantangan urbanisasi. Populasi penelitian mencakup warga berusia di atas 18 tahun yang berdomisili di wilayah tersebut (Amin, Garancang & Abunawas, 2023). Proses analisis data dilakukan melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan menggunakan teknik triangulasi data dan sumber untuk memastikan validitas temuan.

## Hasil dan Pembahasan

Implementasi kebijakan publik merupakan proses krusial dalam memastikan bahwa kebijakan yang telah dirumuskan dapat terlaksana sesuai tujuan awal. Dalam konteks penelitian ini, implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung No. 09 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah di Kelurahan Kebon Jayanti menjadi objek utama untuk dianalisis.

Untuk menganalisisnya, digunakan pendekatan teori implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn yang mencakup enam variabel penting yaitu:

1. Standar dan sasaran kebijakan
2. Sumber daya
3. Karakteristik organisasi pelaksana
4. Komunikasi antar organisasi
5. Disposisi atau sikap para pelaksana
6. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Oleh karena itu, peneliti menjadikan enam variabel tersebut sebagai dimensi dalam penelitian implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kelurahan Kebon Jayanti.

## Standar dan Sasaran Kebijakan

Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Bandung mengacu pada Perda No. 09 Tahun 2018, yang bertujuan menciptakan lingkungan kota yang bersih dan berkelanjutan. Kebijakan ini membagi peran antara DLH, kecamatan, dan kelurahan. DLH menangani aspek teknis seperti pengangkutan dan pemrosesan sampah, sementara kelurahan difokuskan pada pengurangan sampah dari sumbernya melalui program bank sampah, rumah maggot, dan edukasi warga (Ibu Riri, DLH). Namun, menurut Ibu Yuniarti dari Kelurahan Kebon Jayanti, kelurahan tidak memiliki fasilitas operasional, sehingga perannya terbatas pada penyadaran masyarakat.

Meskipun terdapat inisiatif lokal seperti GELISAH dan Bank Sampah “Bonti Sukses,” efektivitasnya masih terhambat oleh keterbatasan SDM dan fasilitas. Petugas GOBER yang berusia lanjut dan peningkatan volume sampah saat musim hujan, seperti disampaikan Pak Aceng (RW 10), menjadi tantangan tersendiri. Berdasarkan teori Van Meter dan Van Horn (1975), hambatan ini mencerminkan lemahnya standar kebijakan yang tidak terukur serta kurangnya dukungan sumber daya, dua variabel utama yang memengaruhi keberhasilan implementasi.

Hasil observasi menunjukkan bahwa peran kelurahan lebih bersifat normatif karena minimnya wewenang terhadap anggaran dan alat operasional. Tanpa dukungan kelembagaan dan teknis yang memadai, implementasi cenderung simbolis. Oleh karena itu, diperlukan strategi seperti regenerasi pelaksana, alokasi anggaran khusus, dan pelatihan teknis agar sasaran kebijakan dapat diwujudkan secara konkret di lapangan.

## Sumber Daya

Sumber daya merupakan faktor esensial dalam implementasi kebijakan publik, sebagaimana dijelaskan oleh Van Meter dan Van Horn (1975), yang mencakup aspek sumber daya manusia, pendanaan, fasilitas kerja, serta sarana dan prasarana. Di Kelurahan Kebon Jayanti, kelemahan utama terletak pada keterbatasan tenaga kerja, di mana sebagian besar petugas GOBER telah lanjut usia dan tidak didukung oleh sistem regenerasi. Hal ini berdampak pada lambatnya pengangkutan sampah, seperti diungkapkan oleh Pak Aceng dari RW 10. Belum adanya pelatihan atau penambahan tenaga baru memperburuk kondisi operasional di lapangan.

Dari sisi pendanaan, program pengelolaan sampah belum memiliki anggaran tetap, sehingga pelaksanaan sangat tergantung pada Musrenbang atau hibah dari DLH Kota Bandung. Keterbatasan ini berimbas pada kurangnya fasilitas penunjang, seperti rumah maggot yang belum memiliki alat pencacah organik dan bank sampah yang masih menggunakan sistem pencatatan manual. Minimnya sarana seperti timbangan digital, kendaraan pengangkut, dan TPA mini juga mengurangi partisipasi warga. Bu Asri dan Bu Hana mengeluhkan sampah yang harus lama disimpan di rumah karena keterbatasan pengangkutan, yang akhirnya menurunkan semangat warga untuk berkontribusi.

Menurut teori Van Meter dan Van Horn, kekurangan sumber daya dapat menghambat realisasi kebijakan meskipun standar sudah ditetapkan. Di Kebon Jayanti, tanggung jawab besar yang diberikan kepada kelurahan tidak dibarengi dengan dukungan anggaran,

logistik, dan kelembagaan yang memadai. Kondisi ini menimbulkan beban administratif dan berisiko membuat implementasi Perda No. 09 Tahun 2018 stagnan di level normatif. Oleh karena itu, penguatan struktur sumber daya menjadi sangat penting melalui penyediaan SDM profesional, anggaran operasional yang berkelanjutan, serta fasilitas pendukung yang memadai.

### **Karakteristik Organisasi Pelaksana**

Karakteristik Karakteristik pelaksana merupakan variabel penting dalam teori implementasi Van Meter dan Van Horn (1975), yang mencakup struktur organisasi, kapasitas teknis, dan komitmen terhadap kebijakan. Ketiga unsur ini berpengaruh langsung terhadap keberhasilan implementasi, khususnya pada kebijakan yang membutuhkan koordinasi antar level pemerintahan dan partisipasi warga seperti pengelolaan sampah. Di Kelurahan Kebon Jayanti, struktur pelaksana dibentuk melalui Seksi Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang), kader lingkungan, serta peran aktif RT/RW.

Namun, kapasitas antar wilayah tidak merata. RW 07 menunjukkan pelaksanaan program yang tertib dengan adanya bank sampah, kader edukatif, dan dokumentasi kegiatan, sementara RW 05 mengalami stagnasi karena lemahnya koordinasi dan absennya pelaksana aktif. RW 10 berada di antara keduanya, dengan dokumentasi yang rapi namun masih menghadapi keterbatasan dalam pelatihan teknis. Hal ini sejalan dengan pernyataan Van Meter dan Van Horn bahwa tanpa kompetensi yang memadai, efektivitas pelaksanaan akan terganggu.

Koordinasi antara kelurahan dan DLH masih berjalan satu arah, yang membuat tindak lanjut terhadap usulan program lambat dan kurang responsif. Selain itu, pelaksanaan kebijakan sangat bergantung pada peran individu seperti ketua RW atau kader lingkungan yang memiliki komitmen tinggi. Ketergantungan ini menunjukkan lemahnya sistem kelembagaan yang berkelanjutan.

Untuk mengatasi ketimpangan implementasi, penguatan karakteristik pelaksana menjadi prioritas, tidak hanya melalui pelatihan teknis, tetapi juga pengembangan struktur organisasi lokal, penguatan kepemimpinan komunitas, dan pemberian insentif berbasis kinerja. Dengan pelaksana yang kompeten dan terorganisasi, kebijakan pengelolaan sampah dapat dijalankan secara lebih optimal dan berkelanjutan.

### **Komunikasi antar Organisasi**

Komunikasi merupakan elemen krusial dalam pelaksanaan kebijakan publik karena berfungsi sebagai jalur utama penyampaian instruksi, klarifikasi kebijakan, serta koordinasi antar pemangku kepentingan (Van Meter & Van Horn, 1975). Dalam implementasi Perda Kota Bandung No. 09 Tahun 2018 di Kelurahan Kebon Jayanti, saluran komunikasi dibangun mulai dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) hingga ke tingkat kelurahan dan RW, terutama melalui media daring seperti grup WhatsApp dan laporan tertulis bulanan. Menurut Ibu Yuniarti selaku Kasi Ekonomi dan Pembangunan, laporan bulanan yang dikirim ke DLH mencakup aktivitas pengelolaan sampah dan kendala seperti keterbatasan fasilitas rumah maggot dan menurunnya partisipasi warga.

Meskipun sistem komunikasi ini telah berjalan, penyebarannya belum merata di seluruh RW. RW 07 dan RW 10 menerima informasi secara rutin dan menyalurkannya melalui grup WhatsApp serta forum pertemuan warga. Sebaliknya, RW 05 menghadapi hambatan komunikasi, di mana informasi program seperti rumah maggot atau bank sampah tidak tersampaikan, sebagaimana diakui oleh Bu Hana, salah satu warga. Ketimpangan ini mencerminkan peringatan Van Meter dan Van Horn (1975) bahwa komunikasi yang tidak menyeluruh dapat menimbulkan perbedaan persepsi kebijakan dan menghambat efektivitas implementasi.

Permasalahan ini tidak hanya berkaitan dengan akses teknologi, tetapi juga dengan lemahnya inisiatif kelembagaan dalam menciptakan sistem komunikasi yang inklusif. RW yang memiliki kader lingkungan aktif lebih mampu mendistribusikan informasi secara sistematis, sedangkan RW yang pasif menunjukkan kurangnya aliran informasi yang berdampak langsung pada stagnasi program. Ketua RW 10, Pak Aceng, mengungkapkan bahwa adanya komunikasi dua arah dengan pihak kelurahan memungkinkan respons yang lebih cepat terhadap aspirasi warga. Hal ini mengindikasikan bahwa komunikasi yang terstruktur dan terbuka sangat menentukan efektivitas pelaksanaan kebijakan. Peneliti menilai bahwa tanpa sistem komunikasi yang merata dan adaptif, pelaksanaan kebijakan cenderung mengalami fragmentasi. Oleh karena itu, perlu penguatan peran RT/RW sebagai simpul informasi serta pemanfaatan berbagai media lokal seperti papan pengumuman lingkungan atau kanal komunitas sebagai strategi komunikasi alternatif.

Secara keseluruhan, dinamika komunikasi dalam konteks pelaksanaan Perda No. 09 Tahun 2018 memperlihatkan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya bergantung pada isi regulasi, tetapi juga pada seberapa efektif pesan kebijakan disampaikan dan diterima oleh seluruh elemen masyarakat.

### **Disposisi atau Sikap Para Pelaksana**

Disposisi pelaksana menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn (1975), mencakup pemahaman, sikap, dan kemauan untuk melaksanakan kebijakan. Di Kelurahan Kebon Jayanti, disposisi pelaksana menunjukkan variasi antarlokasi. Kelurahan menunjukkan dukungan aktif, seperti diungkap Ibu Yuniarti yang memfasilitasi kegiatan pelatihan dan program lingkungan warga RW 07. Respons cepat dari kelurahan memperlihatkan pemahaman dan komitmen terhadap kebijakan.

Namun, di RW 05 ditemukan disposisi pelaksana yang pasif. Usulan warga terkait bank sampah tidak ditindaklanjuti, dengan alasan menunggu instruksi dari level atas. Kelemahan respons ini juga berdampak pada aspek teknis, seperti lambatnya penanganan tumpukan sampah karena belum tersedia TPS. Hal ini menunjukkan bahwa disposisi pelaksana dipengaruhi oleh keterbatasan kewenangan dan struktur birokrasi yang tidak fleksibel. Sebaliknya, RW 10 menunjukkan disposisi yang kuat melalui komunikasi aktif antara warga dan kelurahan. Menurut Pak Aceng, laporan rutin melalui grup WhatsApp memicu respons cepat dari pihak kelurahan. Ini menunjukkan bahwa interaksi dua arah dapat memperkuat sikap pelaksana terhadap kebijakan.

Temuan ini menegaskan bahwa dukungan struktur kelembagaan dan saluran komunikasi yang efektif sangat menentukan kualitas disposisi pelaksana. Peneliti merekomendasikan pelatihan yang menyentuh pemahaman kebijakan dan penguatan mentalitas pelayanan, disertai pelimpahan sebagian kewenangan ke kelurahan. Tanpa sistem yang adaptif dan pelaksana yang diberdayakan, kebijakan akan sulit dijalankan secara efektif di lapangan. Variasi disposisi di Kelurahan Kebon Jayanti mencerminkan perlunya pendekatan yang lebih terintegrasi dalam implementasi Perda No. 09 Tahun 2018.

### **Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik**

Lingkungan eksternal merupakan variabel penting dalam model implementasi Van Meter dan Van Horn (1975), meliputi kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang dapat mendukung atau justru menghambat pelaksanaan kebijakan. Di Kelurahan Kebon Jayanti, dinamika sosial yang heterogen memunculkan variasi dalam penerimaan dan keterlibatan warga. RW 07 berhasil mengelola keberagaman melalui kerja sama antar generasi, seperti keterlibatan ibu-ibu PKK dan Karang Taruna dalam program lingkungan. Kepemimpinan RW yang komunikatif turut memperkuat ekosistem sosial yang mendukung program. Sebaliknya, RW 05 mengalami lemahnya partisipasi warga, minimnya penggerak komunitas, dan struktur sosial yang tidak aktif, sehingga kebijakan tidak tersampaikan secara optimal. Dari sisi ekonomi, mayoritas warga bekerja di sektor informal. Di RW 07, bank sampah memberikan insentif ekonomi yang menarik, mendorong partisipasi warga. Namun di RW 05, ketiadaan fasilitas dan pemahaman nilai ekonomis sampah menghambat keterlibatan.

Secara politik, kehadiran tokoh lokal berpengaruh terhadap legitimasi kebijakan. Di RW 07 dan RW 10, lurah aktif terlibat dalam kegiatan, menciptakan rasa diperhatikan dan memperkuat kepercayaan publik. Sebaliknya, RW 05 menunjukkan lemahnya kepemimpinan lokal dan komunikasi dua arah. Berdasarkan kerangka Van Meter dan Van Horn, interaksi antara kondisi sosial, ekonomi, dan politik secara langsung membentuk keberhasilan implementasi.

Peneliti menyimpulkan bahwa keberhasilan Perda No. 09 Tahun 2018 sangat bergantung pada adaptasi kebijakan terhadap konteks lingkungan eksternal. Kebijakan perlu bersifat kontekstual dengan memperhatikan dinamika sosial, dukungan ekonomi mikro, serta kehadiran politik lokal yang aktif.

### **Simpulan**

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 09 Tahun 2018 di Kelurahan Kebon Jayanti menunjukkan adanya realisasi kebijakan yang variatif antar wilayah. Di RW 07, kebijakan berjalan relatif efektif berkat struktur pelaksana yang aktif, tersedianya sumber daya yang memadai, serta komunikasi yang intensif antar lini birokrasi. Hal ini sejalan dengan pandangan Van Meter dan Van Horn (1975), yang menekankan bahwa implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh variabel seperti sumber daya, komunikasi, karakteristik pelaksana, serta konteks eksternal yang melingkupinya. Sebaliknya, pelaksanaan di RW 05 dan sebagian RW 10 mengalami kendala serius, terutama

menyangkut keterbatasan tenaga kerja, minimnya fasilitas pendukung, dan lambatnya respon kelembagaan. Salah satu warga menyampaikan, “Kita sudah beberapa kali ajukan bantuan untuk bank sampah, tapi sampai sekarang belum ada tindak lanjut. Kelurahan katanya masih menunggu dari atas,” yang menggambarkan adanya hambatan birokrasi yang belum tertangani secara tuntas.

Kondisi sosial ekonomi dan kualitas kepemimpinan lokal juga berperan penting dalam membentuk efektivitas pelaksanaan kebijakan. RW 07, dengan komunitas warga yang kompak dan didukung pemimpin lokal yang responsif, menunjukkan hasil lebih baik dibanding RW lain yang minim dukungan sosial dan infrastruktur. Selain itu, pemahaman para pelaksana kebijakan terhadap isi regulasi, serta akses komunikasi ke instansi yang lebih tinggi, memengaruhi responsivitas mereka dalam menyikapi permasalahan teknis di lapangan. Namun demikian, keterbatasan kewenangan di tingkat kelurahan menjadi hambatan struktural yang tidak bisa diabaikan. Seperti disampaikan salah satu informan kelurahan, “Kalau masalah anggaran dan operasional, kami harus koordinasi dulu ke kecamatan atau DLH.”

Dari temuan ini, dapat disimpulkan bahwa efektivitas implementasi Perda tidak dapat hanya mengandalkan partisipasi warga atau antusiasme pelaksana di tingkat lokal. Diperlukan desain kebijakan yang memperkuat kapasitas institusional di level kelurahan, memperjelas distribusi kewenangan, serta menyediakan dukungan teknis dan anggaran secara merata. Peneliti merekomendasikan perlunya reformasi dalam tata kelola lintas level pemerintahan, khususnya dalam aspek komunikasi birokratis dan desentralisasi anggaran.

Implikasi penting dari temuan ini menunjukkan bahwa kesenjangan dalam implementasi kebijakan lingkungan tidak semata soal perilaku warga, melainkan juga bersumber dari ketidakseimbangan sistemik antar wilayah dan lemahnya daya dukung struktural. Untuk itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggali lebih dalam tentang hubungan antara pola kepemimpinan lokal, partisipasi warga, dan efektivitas birokrasi dalam konteks implementasi kebijakan lingkungan. Rekomendasi praktis yang dapat diterapkan pemerintah kota antara lain: memberikan pelatihan teknis kepada pelaksana di tingkat RW, menyediakan platform digital untuk koordinasi lintas OPD, serta menyusun sistem monitoring berbasis wilayah yang mampu mendeteksi hambatan implementasi secara dini.

## Daftar Pustaka

- Amin, N. F., Garancang, S., & Abunawas, K. (2023). Konsep umum populasi dan sampel dalam penelitian. *Jurnal Pilar*, 14(1), 15–31.
- Arifin, Z. R. (2024). *Implementasi kebijakan peraturan daerah tentang ruang terbuka hijau dalam peningkatan kualitas lingkungan di Kota Bandung* (Bachelor's thesis). Universitas Jendral Achmad Yani, Kota Cimahi.
- Fadilla, A. R., & Wulandari, P. A. (2023). Literature review analisis data kualitatif: Tahap pengumpulan data. *Mitita Jurnal Penelitian*, 1(3), 34–46.
- Firmansyah, M., Masrun, M., & Yudha, I. D. K. (2021). Esensi perbedaan metode kualitatif dan kuantitatif. *Elastisitas - Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 3(2), 156–159.

- Forwanti, E., & Setiawan, F. (2022). Implementasi kebijakan penanganan gelandangan dan pengemis oleh Dinas Sosial Kota Palangka Raya. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 8(2), 88–101.
- Hamdi, M. (2014). *Kebijakan publik: Proses, analisis, dan partisipasi* (2nd ed.). Ghalia Indonesia.
- Heti Aisah, Q., Zaqiah, Q. Y., & Supiana, A. (2021). Implementasi kebijakan asesmen kemampuan minimum (AKM): Analisis implementasi kebijakan AKM. *Jurnal Pendidikan Islam Al-Affan*, 1(2), 128–135.
- Indartik, I., Suryandari, E. Y., Djaenudin, D., & Pribadi, M. A. (2018). Penanganan sampah rumah tangga di Kota Bandung: Nilai tambah dan potensi ekonomi. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, 15(3), 195–211.
- Irfana, T. B., Harjono, R. N., & Diana, T. B. (2023). Evaluation of waste bank program: Transformative impact on community welfare, environment, and economy. *Research Horizon*, 3(5), 585–594.
- Iriawan, H. (2024). *Teori kebijakan publik* (1st ed.). PT. Literasi Nusantara Abadi Group.
- Kahfi, A. (2017). Tinjauan terhadap pengelolaan sampah. *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, 4(1), 12–25.
- Kasmad, R. (2013). *Studi implementasi kebijakan publik*. Kedai Aksara.
- Lasaiba, M. A. (2024). Innovative strategies for urban waste management: Integration of technology and community participation. *Geoforum*, 3(1), 1–18.
- Mariane, I., Gnagey, M. R., Karali, M. A. M. I., & Hardiyanti, E. (2025). Implementasi kebijakan pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Kelurahan Antapani Tengah, Kecamatan Antapani, Kota Bandung. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 16(1), 93–108.
- Mulya, A. P. (2024). Optimalisasi pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Kelurahan Kebon Jayanti Kota Bandung. *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)*, 7(1), 62–73.
- Mulyadi, D. (2018). *Studi kebijakan publik dan pelayanan publik*. CV Alfabeta.
- Muthi Janatun, Rosiana, I., & Darmawan, I. (2023). Evaluasi implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Bandung. *Jurnal Pengabdian Cendekia*, 2(3), 159–166.
- Opendata Bandung. (2024). *Produksi sampah Kota Bandung tahun 2024*. <https://opendata.bandung.go.id/dataset/jumlah-produksi-sampah-menurut-jenisnya-di-kota-bandung>
- Pramono, J. (2020). *Implementasi dan evaluasi kebijakan publik*. UNISRI Press.
- Puspita, M. (2023). Strategi keberhasilan pengelolaan sampah Kota Bandung melalui bank sampah. *Jurnal Digital Bisnis, Modal Manusia, Marketing, Entrepreneurship, Finance, & Strategi Bisnis (DImmensi)*, 3(2), 85–90.
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. *Administration & Society*, 6(4), 445–488.
- Weible, M., & Sabatier, P. A. (2018). *Theories of the policy process* (4th ed.). Westview Press.
- Winarno, B. (2007). *Kebijakan publik: Teori dan proses*. Media Pressindo.

Yamtana, T., Duha, T., Riduan, A., Sabir, M., & Aprianto, M. C. (2023). The effect of waste management policies, community participation, and waste treatment technology on environmental pollution levels in West Java. *West Science Interdisciplinary Studies*, 1(12), 1471–1481.